

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya demokrasi, partai politik menjadi satu hal penting dalam pemilihan umum sehingga disebut sebagai komponen politik yang paling ampuh dalam dinamika politik untuk mencapai tujuan politik. Sehingga, partai politik menempati pilar utama penyangga demokrasi yang mana tidak ada demokrasi tanpa partai politik.¹ Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah organisasi yang stabil dengan tujuan mengambil dan mengendalikan pemerintah untuk pemimpin agar memberikan anggotanya keuntungan yang ideal dan material.²

Partai politik tidak hanya berperan sebagai saluran aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahana untuk mengartikulasikan tuntutan politik dalam sistem politik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sebagai jenis organisasi yang berkompetisi untuk membentuk kabinet pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, legislatif memiliki kewajiban untuk dapat membela kepentingan konstituennya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, anggota DPRD wajib memenuhi sejumlah tugas, termasuk asimilasi dan pengumpulan aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja rutin, akomodasi dan tindak

¹ Maksudi, B. I. 2012. *Sistem politik Indonesia: pemahaman secara teoritik dan empirik*. Raja Grafindo Persada. Hlm. 265

² Miriam Budiarjo, 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 161

lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta akuntabilitas moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Menurut Miriam budiarjo, terdapat empat macam peran partai politik, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana perumusan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi seseorang untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan pengkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen dan kemungkinan berpotensi konflik.³

Dalam menjalankan proses sosialisasi politik dan rekrutmen politik bergantung pada komunikasi politik. Oleh karena itu komunikasi politik menyentuh semua aspek sistem politik. Komunikasi yang mengalir dari masyarakat ke penguasa politik adalah gagasan yang mendasari pemikiran yaitu artikulasi kepentingan. Proses menampung, mengubah, dan meliputi aspirasi politik masyarakat berupa tuntutan dan dukungan menjadi alternatif kebijakan publik berupa kebijakan dan keputusan merupakan fungsi agregasi kepentingan.

Fungsi komunikasi politik perlu diteliti karena partai politik memiliki peran dalam mengarahkan pembuatan kebijakan, di mana banyak individu atau kelompok dalam pemerintahan atau masyarakat harus memutuskan apa yang mereka butuhkan

³ Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 405-409

sebelum suatu kebijakan ditetapkan dan diharapkan dari politik yang didapat dari penyampaian aspirasi-aspirasi dari masyarakat.

Partai akan memediasi masyarakat dengan pemerintah untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Seluruh aspirasi masyarakat akan diakomodir oleh partai melalui wakil-wakilnya di parlemen karena ini merupakan salah satu fungsi partai politik dalam menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat.

Fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan sangat tergantung pada komunikasi politik, namun saat ini banyak partai politik yang gagal menerapkan mekanisme informasi atau pesan politik dari pemerintah yang berupa kebijakan (*policy*) atau keputusan (*decision*) yang diharapkan sampai kepada masyarakat melalui perantara partai politik hingga menjadi hilang arah dan tujuannya.⁴ Pelaksanaan fungsi komunikasi politik dalam menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan membutuhkan saluran yang tepat agar tidak terjadi miskomunikasi. Saluran komunikasi politik merupakan sarana penghubung antara komunikator dan komunikan agar komunikasi politik berjalan sesuai dengan harapan.

Partai Gerindra sebagai partai yang mendapatkan dukungan besar di Sumatera Barat tentu memiliki tanggungjawab besar juga untuk melaksanakan fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan pasca pemilihan umum 2019. Kemampuan menjalankan fungsi komunikasi politik, artikulasi dan agregasi

⁴ Imansyah, T. 2012. Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), Hlm.375

dengan baik menjadi suatu modal sebuah partai politik untuk tetap mendapat dukungan publik pada Pemilihan Umum 2024 nantinya. Melalui komunikasi politiklah terjadi transfer informasi, ide, dan gagasan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengelola negara bersama-sama dan bergerak kearah lebih baik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Olih Solihin (2018), Antonius Kundumuya (2020), Usman Hadi (2021), Jenli Maarontong (2020) dan Desman dkk (2021) sama dengan penelitian peneliti yaitu membahas mengenai pelaksanaan komunikasi partai dan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa penelitian sebelumnya beranjak dari strategi atau pelaksanaan komunikasi partai saja sedangkan penelitian peneliti juga membahas fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan. Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan oleh peneliti, bahwa pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi komunikasi politik, fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan partai Gerindra setelah Pemilihan Umum terlebih dengan latar belakang, segi waktu dan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilatar belakangi karena sudah selayaknya partai-partai politik di Indonesia terutama di Sumatera Barat menjalankan fungsi politiknya agar negara ini dapat beranjak menuju kemajuan khususnya Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat mengharapkan agar partai politik dapat menjalankan fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan yang dapat menunjang keberhasilan sebuah negara. Tetapi pada kenyataannya partai politik menjalankan fungsi yang berbeda,

pelaksanaan komunikasi politik yang dilaksanakan oleh partai politik tidak lagi dirasakan dengan baik oleh sebagian masyarakat di Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha melihat pelaksanaan fungsi komunikasi, fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan yang dilaksanakan DPD Gerindra pasca Pemilihan Umum 2019 yang mana Partai Gerindra sebagai partai politik yang tergolong baru yang telah berhasil menjadi partai pemenang pada Pemilihan Umum Sumatera Barat. Penelitian ini menjadi baru sebab jika dilihat pada penelitian yang telah ada sebelumnya isu yang dikaji terkait dengan komunikasi politik berangkat dari isu strategi kemenangannya saja bukan pelaksanaan komunikasinya dengan masyarakat pasca Pemilihan Umumnya.

Pada beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan pelaksanaan fungsi komunikasi partai saat ini belum berjalan dengan baik di Indonesia.⁵ Tidak banyak penelitian ilmiah yang mengkaji pelaksanaan fungsi komunikasi, fungsi agregasi dan artikulasi pasca Pemilihan Umum. Di Indonesia khususnya di Sumatera Barat komunikasi politik kurang dikelola dengan baik pasca Pemilihan Umum 2019. Aspirasi dan kepentingan massa tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan karena parpol tidak melakukan fungsi intermediasi secara maksimal saat ini.

Kini masyarakat tidak lagi memiliki keyakinan terhadap partai politik yang ada dalam kehidupan sosial dan politik. Representasi yang seharusnya dilakukan partai politik untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi rakyat tidak berjalan. Saat ini

⁵ Jenli Maarontong, 2020. Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik. *E-journal Unsrat: Jurnal Ilmu Politik* Hlm 13

partai hanya sibuk bertarung memperebutkan kekuasaan menjelang Pemilihan Umum dibanding mengatur pola hubungannya dengan konstituen yang telah mengantarkan mereka menuju kekuasaan setelahnya.

Proses pengabaian ini secara lambat telah merusak eksistensi partai politik. Bagi masyarakat, partai politik gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Tidak dilaksanakannya beberapa fungsi oleh partai politik membuat kepercayaan rakyat ke partai politik menurun drastis.

Peneliti menggunakan teori dari Gabriel Almond struktural fungsional yang menjelaskan terdapat tiga konsep untuk mengkaji sistem politik dan kepartaian yaitu sistem, struktur dan fungsi. Dalam teori struktural fungsional, terdapat fungsi-fungsi tertentu yang harus dilaksanakan demi keberlangsungan hidup sistem politik yang bersangkutan yaitu fungsi *input* dan *output*. Fungsi utama yang diakses melalui fungsi input adalah fungsi komunikasi politik, artikulasi kepentingan, dan agregasi kepentingan.

Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan fungsi komunikasi, fungsi agregasi dan artikulasi DPD Gerindra Sumatera Barat di Sumatera Barat tahun 2019-2022 dengan menggunakan teori fungsi partai Gabriel Almond. Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan di atas terkait dengan keberhasilan Partai Gerindra menjadi partai pemenang pada Pemilihan Umum Sumatera Barat tahun 2019 melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis pelaksanaan fungsi komunikasi, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan DPD Gerindra Sumatera Barat pasca Pemilihan

Umum 2019 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik, Fungsi Artikulasi Dan Agregasi Kepentingan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2019-2022”

1.2 Rumusan Masalah

Partai politik saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal sehingga pelaksanaan sistem partai di Indonesia saat ini masih memiliki sejumlah masalah, baik yang dihadapi pada saat proses Pemilihan Umum maupun saat partai melaksanakan fungsi-fungsinya. Sebelum partai politik menyampaikan pendapat masyarakat kepada pemerintah, partai politik harus menyerap berbagai kepentingan masyarakat agar dapat dituangkan menjadi ide-ide, visi dan misi sehingga dapat menjadi kebijakan kenegaraan.⁶

Aspirasi yang diutamakan adalah aspirasi dari kepentingan partai politik, sehingga kepentingan rakyat dianggap kepentingan kedua setelah kepentingan partai politik terpenuhi. Keadaan ini mendorong munculnya persaingan-persaingan yang tidak sehat di antara partai politik dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum itu sendiri.⁷ Terdapat masalah lain seperti munculnya spekulasi dalam masyarakat bahwa partai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan banyaknya partai politik yang

⁶ Rully Khairul A. 2018. Dimensi sosial dalam pelayanan aspirasi masyarakat DPR daerah Jawa Barat. *Jurnal pembangunan nasional*. Hlm 25

⁷ *Panduan Sistem Integritas Partai Politik*. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hlm 9.

terlibat korupsi berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik.⁸

Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019 adalah Pemilihan Umum kelima pasca orde baru dan menjadi Pemilihan Umum serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Pada Pemilihan Umum 2019 Gerindra mengalami peningkatan suara signifikan di Sumatera Barat dibandingkan Pemilihan Umum sebelumnya. Partai Gerindra yang merupakan salah satu partai baru yang membuktikan diri dapat berpartisipasi dan bersaing dalam pemilihan umum.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasri tahun 2021, DPD Partai Gerindra Sumatera Barat mempublikasikan visi-misi dan pesan-pesan politik yang dijanjikan oleh partai politik kepada masyarakat Sumatera Barat dan telah menjalankan fungsi komunikasinya dengan baik menjelang Pemilihan Umum 2019. Tingginya perolehan kursi di Pemilihan Umum menjadi salah satu keberhasilan suatu partai melakukan komunikasinya dengan masyarakat menjelang Pemilihan Umum.⁹

⁸ Nurlatipah Nasir. 2016. Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik DI Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen, *Jurnal Politik Proferik Vol. 04 No. 1 Tahun 2016*. Hlm 3.

⁹ Hasri Wahyuni. 2021. Strategi Partai Gerindra Dalam Mewujudkan Representasi Perempuan di DPRD Provinsi Sumbar Periode 2019-2024. *Jurnal Of Civic Education 4(3)* Hlm 8

Tabel 1.1 Hasil Pemilihan Umum Legislatif Sumatera Barat Tahun 2009, 2014 dan 2019

No	Partai Politik	Perolehan Kursi		
		2009	2014	2019
1.	PKB	-	1	3
2.	Gerindra	4	8	14
3.	PDI-P	3	4	3
4.	Golkar	9	9	8
5.	Nasdem	-	6	3
6.	PBR	2	-	-
7.	PKS	5	7	10
8.	PPP	4	8	4
9.	PAN	6	8	10
10.	Hanura	5	5	-
11.	Demokrat	14	8	10
12.	PBB	3	1	-
	Total Kursi	55	65	65

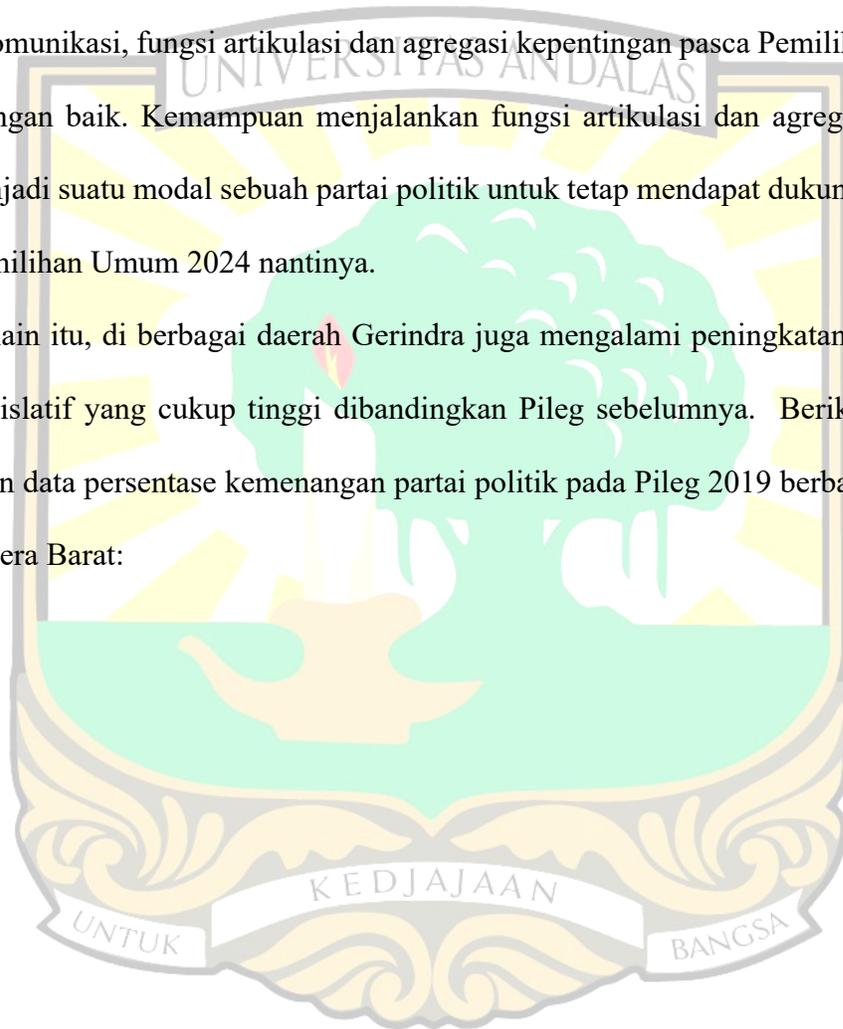
Sumber: Data Sekunder KPU Kota Padang diolah peneliti tahun 2022

Dari tabel 1.1 perbandingan hasil Pemilihan Umum legislatif tersebut terlihat perubahan perubahan kursi dari pemilih secara umum di Sumatera Barat. Pada tahun 2014 Golkar menjadi partai pemenang Pemilihan Umum di Sumatera Barat dengan memperoleh 9 kursi sedangkan Gerindra memperoleh 8 kursi serta PDI Perjuangan yang menang Pemilihan Umum legislatif secara nasional hanya memperoleh 4 kursi di DPRD Sumatera Barat. Namun tahun 2019 Partai Gerindra menjadi partai pemenang Pemilihan Umum di Sumatera Barat dengan keberhasilan memperoleh 14 kursi. Kemenangan Gerindra di Sumatera Barat menjadi salah satu hal yang mencerminkan komunikasi yang baik oleh DPD Gerindra Sumatera Barat saat menjelang Pemilihan Umum 2019. Peningkatan perolehan kursi Gerindra di Legislatif menunjukkan bahwa

partai terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang mengindikasikan bahwa partai mampu beradaptasi dengan perkembangan partai politik di Sumatera Barat.

Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai partai yang mendapatkan dukungan besar di Sumatera Barat tentu memiliki tanggungjawab besar pula untuk melaksanakan fungsi komunikasi, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan pasca Pemilihan Umum 2019 dengan baik. Kemampuan menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi dengan baik menjadi suatu modal sebuah partai politik untuk tetap mendapat dukungan publik pada Pemilihan Umum 2024 nantinya.

Selain itu, di berbagai daerah Gerindra juga mengalami peningkatan perolehan kursi legislatif yang cukup tinggi dibandingkan Pileg sebelumnya. Berikut peneliti lampirkan data persentase kemenangan partai politik pada Pileg 2019 berbagai daerah di Sumatera Barat:



Tabel 1.2 Perolehan Kursi Gerindra pada Pileg Tahun 2009, 2014 dan 2019 di Kab/Kota Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Jumlah Kursi			Persentase Jumlah Kursi 2019
		2009	2014	2019	
1	Kota Padang	2	6	11	11,83%
2	Kab. Agam	0	4	9	9,68%
3	Kab. Padang Pariaman	1	4	7	7,53%
4	Kab. Pasaman Barat	0	4	7	7,53%
5	Kab. Solok	1	4	6	6,45%
6	Kab. 50 Kota	0	5	6	6,45%
7	Kab. Tanah Datar	0	3	6	6,45%
8	Kab. Pesisir Selatan	3	5	5	5,38%
9	Kota Bukittinggi	1	4	5	5,38%
10	Kab. Pasaman	0	3	5	5,38%
11	Kab. Solok Selatan	3	3	4	4,30%
12	Kab. Sijunjung	1	1	4	4,30%
13	Kota Payakumbuh	0	3	4	4,30%
14	Kab. Dharmasraya	2	2	3	3,23%
15	Kota Padang Panjang	2	2	3	3,23%
16	Kota Pariaman	0	3	3	3,23%
17	Kab. Kep. Mentawai	2	2	2	2,15%
18	Kota Solok	0	0	2	2,15%
19	Kota Sawahlunto	1	1	1	1,08%
Total		19	59	93	100%

Sumber: Data Sekunder KPU Kota Padang diolah peneliti tahun 2022

Pada persentase perolehan kursi Pemilihan Umum pada tahun 2019 dalam tabel 1.2 oleh Gerindra di Kota Padang sebesar 11,83% dan memperoleh kursi tertinggi. Dapat dilihat dari tabel 1.2 bahwa Kota Padang menjadi kota terbanyak kursi legislatif tahun 2019 dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat yaitu 11 kursi dari total 45 kursi DPRD Kota Padang Periode 2019-2024. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang mengalami peningkatan suara dibandingkan Pemilihan Umum sebelumnya adalah Kota Padang.

Gabriel A. Almond mengatakan jika proses politik dimulai dari masuknya tuntutan atau artikulasi dan selanjutnya diagregasikan oleh partai politik sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan dapat dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.¹⁰ Dalam Ardial, Almond dan Powell berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi politik dalam sistem politik yang menjadi prasyarat yang sangat diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi lain seperti artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen.¹¹

Artikulasi kepentingan merupakan proses penampungan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah akan mengeluarkan suatu keputusan yang bersifat menolong masyarakat. Sedangkan agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana beberapa tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, di gabung menjadi alternatif-alternatif kebijakan pemerintah.

Komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra Sumatera Barat dengan mensosialisasikan visi dan misi kepada masyarakat, melakukan sosialisasi nama calon legislatif dari Partai Gerindra dan memberikan pendidikan tentang politik maupun non politik.

¹⁰ Almond dalam Hijri S Yana. 2016. *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: UMM Press. Hlm 21.

¹¹ Ardial. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks. Hlm 30

Gambar 1.1 Sosialisasi oleh DPRD Sumatera Barat Partai Gerindra



Sumber: Tribun Sumbar diolah peneliti tahun 2022

Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Sumatera Barat pada gambar 1.1 dalam memberikan sosialisasi peraturan daerah nomor 16 tahun 2019 tentang pemerdataan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil oleh DPRD Sumatera Barat dari Partai Gerindra.¹² Pada sosialisasi yang dimoderatori oleh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yaitu Eka Maryati, Hidayat mensosialisasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil di Sumatera Barat. Sosialisasi ini dilakukan pada 10 September 2022, Sosialisasi Partai Gerindra harus dilakukan secara terus menerus agar masyarakat lebih mengenal partai lebih dalam lagi.

¹² Tribun Sumbar, 2022. “ Sosialisasikan Perda No.16/2019, Anggota DPRD Sumbar, Hidayat: Pedagang Kecil Harus Bebas dari Jeratan Rentenir “ <https://www.tribunsumbar.com/sosialisasikan-perda-no-16-2019-anggota-dprd-sumbar-hidayat-pedagang-kecil-harus-bebas-dari-jeratan-rentenir> diakses pada 13 November 2022 Pukul 10.31 WIB.

Gambar 1.2 Kunjungan Andre Rosiade ke Kelurahan Alai Parak Kopi



Sumber: Detik News diolah peneliti tahun 2022

Dalam menampung aspirasi masyarakat, Ketua DPD Partai Gerindra melakukan kunjungan kepada masyarakat. Seperti halnya pada gambar 1.2 Andre Rosiade menemui tokoh masyarakat dan ketua RT serta RW se-Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.¹³ Ia memberikan laporan kinerja sebagai anggota DPR RI sekaligus menampung aspirasi warga. Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini berjanji akan berkolaborasi dengan anggota DPRD Sumatera Barat dan DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra untuk menuntaskan aspirasi warga.

Gambar 1.3 Kunjungan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ke RST Reksodiwiryong Padang dalam Menampung Aspirasi Masyarakat



¹³ Detiknews, 2022. "Andre Rosiade Tampung Aspirasi Warga Alai Parak Kopi di Padang"
<https://news.detik.com/berita/d-6222124/andre-rosiade-tampung-aspirasi-warga-alai-parak-kopi-di-padang/amp> diakses pada 13 November 2022 pukul 11.07 WIB.

Sumber: Data sekunder dari Detik.com diolah peneliti tahun 2022

Selain ke masyarakat Kelurahan Alai Parak kopi, Ketua DPD Gerindra juga mengunjungi Rumah Sakit Tentara dr Reksodiwiryo Padang pada tanggal 9 Agustus 2022. Pada gambar 1.4 Ketua DPD Gerindra menyampaikan amanah Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto, agar aspirasi dari rumah sakit itu disampaikan kepadanya.¹⁴

Gambar 1.4 Pemberian Bantuan Covid-19 ke Masyarakat Kota Padang



Sumber: Data Sekunder diolah peneliti tahun 2022

Pada gambar 1.5 anggota DPD Partai Gerindra memberikan bantuan *covid-19* kepada warga Kota Padang. Andre Rosiade sebagai ketua DPD Partai Gerindra menjalani arahan ketua umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto, yang mana Gerindra harus hadir kapan pun di tengah masyarakat baik di saat pemilihan umum ataupun tidak. Menurut Prabowo sejak dilantik, Gerindra harus terus bergerak membantu masyarakat. Terutama saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia dan

¹⁴ Detik.com, 2022. “Amanah Prabowo, Andre Rosiade Serap Aspirasi di RST Reksodiwiryo Padang” <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6224222/amanah-prabowo-andre-rosiade-serap-aspirasi-di-rst-reksodiwiryo-padang/amp> diakses pada tanggal 13 November 2022 Pukul 11.22 WIB.

Andre Rosiade juga berharap kepada kader Gerindra, utamanya yang menjadi anggota DPRD agar dapat membantu dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat.¹⁵

Peneliti tertarik dengan fungsi partai pasca Pemilihan Umum karena demokrasi menjadi sangat penting setelah Pemilihan Umum selesai, bukan saat pencoblosan/Pemilihan Umum. Pada dasarnya sistem politik yang demokratis terdapat gagasan, ide, dan nilai ketika fungsi partai politik sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan teori para ahli, maka akan berimplikasi kepada sistem politik yang lebih demokratis. Fungsi komunikasi politik yang baik perlu dijalankan karena partai politik menjadi sebuah wadah yang digunakan oleh warga negara sebagai sarana berpartisipasi kedalam pengelolaan negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan Pemilihan Umum pada dasarnya merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, Pemilihan Umum dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Komunikasi DPD Partai Gerindra Sumatera Barat pada tahun 2019-2022 menarik untuk diteliti karena Partai Gerindra menjadi partai dominan yang banyak mendapatkan perolehan kursi di Sumatera Barat saat pemilihan legislatif tahun 2019.

¹⁵ Klikpositif.com, 2022. “Jelang Lebaran, Andre Rosiade Bagikan Puluhan Ribu Paket Sembako di Sumbar”
<https://klikpositif.com/jelang-lebaran-andre-rosiade-bagikan-puluhan-ribu-paket-sembako-di-sumbar/amp/> Diakses pada 17 November 2022 pukul 19.31

Sebagai salah satu partai dominan Gerindra harus memiliki peran penting dalam memberikan pengaruh dan fungsi politik kepada pemerintah maupun masyarakat di Sumatera Barat tidak hanya menjelang Pemilihan Umum, melainkan juga pasca Pemilihan Umum. Oleh karena itu, penelitian ini dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional.

Asumsi peneliti bahwa DPD Partai Gerindra telah mengupayakan pelaksanaan fungsi komunikasi politik, fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan pasca Pemilihan Umum, hal ini dibuktikan dengan DPD Partai Gerindra berupaya untuk terus menampung aspirasi masyarakat di Sumatera Barat. Asumsi yang peneliti bangun ini juga didasarkan atas fakta-fakta yang peneliti temukan pada data yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi komunikasi politik, fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan DPD Partai Gerindra Sumatera Barat yang nantinya akan peneliti jadikan sebagai data awal dalam melihat lebih jauh fungsi pelaksanaan komunikasi, agregasi dan artikulasi DPD Partai Gerindra Sumatera Barat.

Penelitian ini berlimitasi pelaksanaan fungsi komunikasi, fungsi agregasi dan artikulasi Partai Gerindra tahun 2019 sampai 2022. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana DPD Partai Gerindra Sumatera Barat melaksanakan fungsi komunikasi, fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan pasca Pemilihan Umum 2019. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi komunikasi politik DPD Partai Gerindra Sumatera Barat tahun 2019-2022?

2. Bagaimana pelaksanaan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan DPD Partai Gerindra Sumatera Barat tahun 2019-2022?

Pemilihan DPD Gerindra Sumatera Barat sebagai objek penelitian disebabkan karena kewenangannya yang lebih besar dan memiliki cakupan yang lebih luas, sehingga DPD Gerindra memiliki kewenangan untuk menempatkan caleg-caleg di Sumatera Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan fungsi komunikasi politik DPD Partai Gerindra Sumatera Barat tahun 2019-2022
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan DPD Partai Gerindra Sumatera Barat tahun 2019-2022

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang partai politik, terutama dalam proses pelaksanaan fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan yang terdapat pada setiap partai politik di Indonesia.

b) Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dan kebaharuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan kajian pelaksanaan fungsi partai politik pada Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas dan dapat berguna sebagai sumbangan bagi dunia pendidikan tentang kinerja lembaga dalam melaksanakan fungsi partai di Indonesia.

c) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan lanjutan penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama namun pada objek yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi partai politik di Sumatera Barat terutama Partai Gerakan Indonesia Raya terkait pelaksanaan fungsi komunikasi, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan partai politik.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai partai politik.

